KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA DI DESA WAJOK HILIR KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:
DESI AMALIA
NIM. E42012004

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

E-mail : adesi416@gmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang belum optimal, baik dalam pemahaman anggota BPD dalam pembuatan peraturan, pemahamannya sebagai lembaga aspirasi masyarakat belum terlaksana dan adanya pelaksanaan tugas yang belum terselesaikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kaulitatif dengan jenis penelitian observasi. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Subjek penelitian ini adalah BPD, Kepala Desa Wajok Hilir, Kepala Dusun beserta Tokoh Agama di Desa Wajok Hilir. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah BPD Wajok Hilir belum mampu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal terkait dengan faktor individu yang berhubungan dengan kemampuan dan keahlian, faktor psikologis yang berhubungan dengan persepsi, sikap maupun motivasi, dan faktor organisasi berkaitan dengan sumber daya dan kepemimpinan.

Kata-kata Kunci:Kinerja BPD, Individual, Psikologis, Organisasi, Optimal.

THE PERFORMANCE OF VILLAGE CONSULTATIVE BODIES IN CARRYING OUT THEIR DUTIES AND FUNCTIONS AT WAJOK HILIR VILLAGE SIANTAN SUB DISTRICT MEMPAWAH REGENCY

Abstract

This writing aimed to know and analyze the factors that influence performance of Village Consultative Bodies in doing their duties that's not optimal enough, including in understanding of Village's rule regulation, understanding as an institution of public aspirations have not been implemented and the implementation of the tasks yet to be done. This research uses qualitative research methods to the type of observation study. This research took place in Wajok Hilir Village Siantan sub District Mempawah Regency. The subjects of this research are Village Consultative Bodies, Village Head of Wajok Hilir, Head of sub Village, Prominent Figure of Religion in Wajok Hilir Village. The conclusion is the Village Consultative Bodies of Wajok Hilir not able yet to do their duties finally thire performance is not optimal associated with individual factors associated with the ability and expertise, psychological factors related to the perception, attitude and motivation, and organizational factors related premises resources and leadership.

Keywords: Village Parlementary Performance, Psycology, Organization, Optimal.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan sebuah trobosan bagi masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri secara demokrasidengan kata lainsistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa persetujuannya ada ditangan rakyat.

Diaturnya Undang-Undang tentang pemerintah Desa tersebut tentunya tidak terlepas dari perwujutan UUD 1945 yaitu Pasal 1ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang bebentuk Republik. Kemudian dalam ayat (2) kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan dalam pasal 18A ayat (1) dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Kabupaten dan kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang.

Mewujutkan demokrasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan publik serta penyelenggaraan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan berdasarkan demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain Badan Permusyawaratan Desa yang disebut pula (BPD) memiliki tugas memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah untuk masyarakatnya.

Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaran Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyeleggaraan pemerintah Desa. Dalam hasil musyawarah Desa menghasilkan bentuk kesepakatan yang dituangkan

DESI AMALIA, NIM. E42012004
Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaran Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang disebut pula Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga partisipasi masyarakat merupakan kunci proses dalam penyusunan peraturan.

Keberadaan BPD merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, apabila dihubungkan dengan keinginan untuk menegakkan demokrasi dan kedaulatan rakyat desa.Badan Permusyawaratan Desa haruslah dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lembaga yang kuat dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara adil, makmur, dan sejahtera (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2007 tentang BPD, menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berkedudukan sebagai wadah-wadah penampung aspirasi masyarakat yang akan diteruskan dalam rapat musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD.

Keberadaan BPD adalah sebagai Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untukmelaksanakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.Tugas dan fungsi pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawarata Desa.Pemerintah Desa itu sendiri memiliki tugas utama yang harus diemban, dimana tugas tersebut adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratif dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan.Untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan desa dan juga untuk menciptakan suatu pemerintahan yang mampu memberikan kontribusi dan mampu menampung berbagai harapan, keinginan, serta aspirasi masyarakat maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai salah satu unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi di Desa diharapkan menunjukkan peran penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 serta diatur pula di Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Desa untuk menjalankan satu fungsi yang utuh dalam suatu sistem pemerintahan desa serta berfungsi menanpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa yaitu rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, dan pemuka agama. Sehingga diperlukan sinergitas antara semua unsur terutama antara Kepala Desa dengan BPD. Dengan demikian diharapkan akan mendorong peningkatan kinerja BPD itu sendiri.

Berdasarkan hasil pra survei menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah menemukan masalah yang berhubungan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Fenomena-fenomena yang dapat dilihat peneliti yaitu sebagai berikut :

1. BPD belum mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga aspirasi masyarakat dilihat dari contoh di lapangan, masyarakat menginginkan adanya responsifitas BPD untuk menanggapi opini atau aspirasi masyarakat dengan mengadakan rapat dan membahas serta mewujutkan peraturan yang berdasarkan aspresiasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. BPD belum mampu melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang merancang dan menetapkan peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dilihat dilapangangan produktifitas yang dihasilkan BPD saat ini hannya terdapat satu peraturan yaitu peraturan (APBDes).
3. Kualitas layanan yang dimiliki BPD masih belum optimal didasari dengan adanya dua pekerjaan yang dimiliki setiap anggota BPD mempengaruhi produktifitas BPD terkait dengan tugas BPD yang belum terselesaikan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan, hal ini jelas

menjadi masalah yang penting untuk diteliti maka oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kinerja BPD belum optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah belum dilaksanakan dengan baik yang dimana terlihat dari fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya responsivitas sebagai lembaga aspirasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan rapat.
2. Kurangnya produktifitas yang dihasilkan BPD berkaitan dengan pembuatan peraturan.
3. Pelaksanaaan dari kualitas pelayanan yang masih kurang optimal.

3. Rumusan Penelitian

Berdasarkan masalah yang terjadi di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. Maka muncul pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi, sebagai berikut : "MengapaKinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah belum optimal?".

4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah.

5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar hasilnya dapat berguna bagi Pemerintahan Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wajok Hilirterhadap tugas pokok dan fungsinya.

1) Secara Teoritis

a. Untuk Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan kajian bagi anggota BPD khususnya di Desa Wajok Hilir dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa, lembaga yang menetapkan

peraturan sertamampu melaksanakan tugas selesai pada waktunya.

b. Untuk Peneliti, Penelitian ini dilakukan guna menjadi syarat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai sarana bagi peneliti untuk melatih kemampuan berfikir serta menerapkan teori-teori yang didapatkan selama mengikuti pendidikan yang didapat selama bangku kuliah.

2) Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan, terutama yang berkenaan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

A. TEORI DAN METODOLOGI

1. Teori Kinerja

Menurut Dwiyanto,dkk (2006:50), mengemukakan beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik sebagai berikut :

1. Produktifitas
   Karakteristik - karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meninggkatkan kualitas kehidupannya.

2. Kualitas layanan
   Banyak pandangan negatif atau kurang memuaskan mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.Dengan demikian kepuasan dari masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.
3. Responsivitas
   Kemampuan organisasi untuk mengenali dan memenuhi kebutuhan masyarakat.Responsivitas perlu dimasukan ke dalam indikator kinerja karena menggambarkan secara langsung kemampuan organisasi pemerintah dalam menjalankan misi dan tujuannya.
4. Responsibilitas
   Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit.
5. Akuntabilitas
   Akuntabilitas publik menunjukkan pada berapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat berapa besar kebijakan dan

kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. (Dwiyanto, 2008:50-51).

Menurut Moeheriono (2012:162) ada tiga konsep yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu :

1. Responsivitas (*Responsiveness*), yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimana kemampuan dihasilkan dari sebuah kapasitas pendidikan, pengalaman, pelatihan serta keterampilan seseorang yang dimana sebuah organisasi publik mampu maupun memiliki kematangan untuk bekerja dengan baik dibidangnya.
2. Responsibilitas *(Responsibility)*, yaitu pelaksanaaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan kebijakan secara implicit maupun eksplisit. Dalam hal ini dimana sebuah organisasi publik yang berhubungan dengan pelaksanaan iyalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas merupakan sebuah keputusan yang bersifat terus terang lansung dan tidak adanya disembunyi-sembunyikan.
3. Akuntabilitas *(Accountability)*, yaitu menunjuk pada besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilayan dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat. Dari pernyataan diatas berarti akuntabilitas merupakan aksi tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan atau terhadap tugas yang diembankepada masyarakat (bersifat horizontal) dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi (bersifat vertical).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja diperjelas lagi oleh, Hennry Simamora (dalam Mangkunegara, 2005:14) yaitu, ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

1. Faktor Individual yang terdiri dari:
   a) Kemampuan dan keahlian
   b) Latar belakang
   c) Demografi
2. Faktor Psikologis yang terdiri dari:
   a) Persepsi
   b) *Attitude* atau sikap
   c) *Personality*atau kepribadian
   d) Pembelajaran
   e) Motivasi
3. Faktor Organisasi yang terdiri dari:
   a) Sumber daya
   b) Kepemimpinan
   c) Penghargaan
   d) Struktur
   e) *Job design*

Faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang dan demografi memiliki hubungan keterkaitan antara satu yang lainnya.dari aspek kemampuan dan kehlian berkaitan dengan pencapaian seseorang dalam melakukan dan mengerjakan tugas yang diberikan, aspek latar belakang

merupakan gambaran keadaan atau situasi keterangan mengenai suatu peristiwa guna melengkapi suatu informasi, aspek demografi merupakan uraian yang berkaitan dengan lingkungan geografis atau keadaan wilayah serta berkaitan dengan uraian tentang penduduk terutama kelahiran, perkawinan, kematian dan imigrasi.

Faktor Psikologis yang terdiri dari persepsi, *attitude*, *personality*, pembelajaran, dan motivasi saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya mempelajari fungsi mental seseorang yang keterkaitannya dengan sikap atau tingkah laku. Dari aspek persepsi merupakan cara pandang dari rangkaian proses yang dilakukan serta yang dialami oleh individu mengenai suatu gagasan,aspek *attitude* atau sikap merupakan kecendrungan seseorang berkaitan dengan perasaan dan pikiran yang bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam lingkungan, aspek *personality*atau kepribadian ialah sifat seseorang dari keseluruhannya yang menonjol, aspek pembelajaran atau kata lain belajar merupakan proses perubahan dalam tingkah laku untuk memperoleh kepandaian yang terjadi karena adanya pengalaman maupun latihan, dan aspek motivasi merupakan sebuah dorongan dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain sehingga membuat diri sendiri ataupun orang lain melakukan tingkah laku tertentu.

Faktor organisasi yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, *job design.* Dari aspek sumber daya ialah suatu nilai potensi yang dimiliki seseorang maupun dimiliki seseorang maupun dimiliki oleh alam di dalam kehidupan. Aspek kepemimpinan ialah merupakan proses yang mana dapat memberikan pengaruh bagi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, aspek penghargaan merupakan perbuatan bentuk apresiasi terhadap sebuah prestasi yang diberikan kepada seseorang baik dari perorang maupun dari suatu lembaga yang biasanya dalam bentuk material, barang maupun ucapan, aspek struktur merupakan gambaran yang memiliki jenjang atau tingkatan yang saling berkaitan antara satu dengan yan lainnya, terakhir yaitu aspek *job design* atau recana kerja merupakan serangkaian tujuan dan proses dalam kegiatan kerja seseorang maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratif, yaitu melakukan penjelajahan berkenaan dengan pertanyaan yang

membutuhkan penjelasan yang mendalam mencari hubungan diantara gejala sosial atau gejala fisik sehingga mampu merumuskan hipotesis yang berarti bagi penelitian. Menurut Sugiyono (2013:1) Penelitian Kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara trianggulasi analisis data bersifat deduktif, dan hasilnya lebih menekankan pada makna generalisasi. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik dengan memanfaatkan wawancara terbuka dan memahami sikap, pandang, perasaan, serta perilaku individu atau sekelompok orang.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, khususnya pada tugas pokok dan fungsi BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislatif yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa, serta memiliki tugas yaitu sebagai lembaga yang berperan dalam membahas rancangan Peraturan Desa, sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa dan lembaga yang memiliki tugas untuk menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara kepada Kepala Desa Wajok Hilir, Kepala BPD, Anggota BPD, Kepala Dusun dan Tokoh Agama di Desa Wajok Hilir. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hannya melakukan penelitian di kantor melainkan juga melakukan penelitian di kediaman responden.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu mitra kerja Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.Maka BPD dituntut untuk bekerja lebih keras lagi sehingga mampu melayani dan memperjuangkan berbagai keinginan dan aspirasi masyrakat.Berkaitan dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat maka BPD memiliki tugas menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakatnya yang kemudian membahas rancangan peraturan desa serta mengawasi jalannya peraturan-peraturan tersebut.

Menetapkan sebuah Peraturan Desa merupakan sebuah fungsi BPD bersama-sama dengan Kepala

Desa.Berkaitan dengan hal tersebut, maka digunakanlah teori Hennry Simamora untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan fenomena-fenomena yang ada sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari teori tersebut tedapat tiga faktor yang mempengaruhi kineja, yaitu:

1. Faktor Individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi.
2. Faktor Psikologis yang terdiridari persepsi, *attitude*, personality, pembelajaran, motifasi.
3. Faktor Organisasi yang terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan *job design.*

1. Faktor Individual

Dalam pembahasan ini penulis menganalisis kinerja BPD dilihat dari faktor individual. Faktor individual ini dimaksudkan iyalah anggota BPD itu sendiri. Menurut Henrry Simamora (dalam Mangkunegara, 2005:14) faktor individu terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang dan demografi. individual mengenai atau berhubungan dengan manusia atau Sumber Daya Manusia (SDM) secara pribadi yang bersifat perseorangan. Sehubungan dengan hal itu maka individu merupakan faktor utama dalam pencapaian kinerja, dengan adanya individu dalam sebuah organisasi yaitu SDM sangat penting untuk mengetahu apakah sudah berjalan optimal atau belum dalam hal pencapaian tujuan yang diharapkan.

Berhubungan dengan kinerja dalam organisasi, ada tiga aspek yang mendasari mengapa faktor individual perlu untuk dipahami khususnya dalam kinerja BPD. Tiga aspek ini saling berhubungan apabila dalam satu organisasi mempunyai pegawai yang kemampuan dan keahlian kurang serta latar belakang yang tidak baik maka kinerja yang akan dihasilkan tidak maksimal, begitupula dengan sebaliknya apabila semua aspek yang ada pada individu baik maka kinerja yang akan dihasilkan akan optimal dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik pula.

2. Faktor Psikologis

Menurut Hendri Simamora (dalam Mangkunegara, 2005:14) kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor salah satunya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang berasal dari dalam individu seseorang, faktor psikologis untuk mengetahui bagaimana cara memahami seseorang dalam

menyesuaikan diri dengan lingkungannya terutama dalam lingkungan organisasi. Faktor psikologis ini terkait dengan persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi seseorang dalam sebuah organisasi. Jika organisasi tidak mengenali hal ini dengan baik, maka dapat berdampak pada pencapaian keberhasilan kinerja yang optimal.

3. Faktor Organisasi

Menurut Hendry Simamora ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi kinerja salah satunya adalah faktor organisasi. Organisasi adalah gambaran yang menunjukan tata hubungan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Merupakan satu sistem yang saling berhubungan dan saling berkerjasama. Dalam faktor organisasi menurut Hennry Simamora ada lima aspek yang terdapat diantaranya sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur dan *job design.*

C. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian yang berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Dapat disimpulkan alasan mengapa kinerja BPD belum optimal dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPD, penelitian menyimpulkan urain-urain pada bagian pembahasan dari bab sebelumnya sebagi berikut:

1. Kinerja BPD di Desa Wajok Hilir dikaji dari faktor individual.

   Faktor individu merupakan faktor pengaruh terutama berkenaan dengan kemampuan dan keahlian terkait dengan kurangnya pemahaman dalam pembuatan peraturan dan tugas sebagai lembaga aspirasi masyarakat serta adanya tugas yang belum terselaikan melatar belakangi penyebabkan kinerja BPD yang belum optimal selama ini.
2. Kinerja BPD di Desa Wajok Hilir dikaji dari faktor psikologis.

   Faktor psikologis diketahui juga berpengaruh terhadap kinerja BPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang masih dapat dikatakan kurang, berkenaan dengan persepsi yang disampaikan dari anggota BPD yang masih belum menyadari akan tugas dan dalam bekerja masih memerlukan arahan memberikan pandangan BPD

kurang mandiri. Sikap BPD khusunya Ketua BPD yang seharusnya bersikap tegas terhadap anggota dan motivasi kepada anggota BPD berkaitan dengan fasilitas yang kurang memadai menyebabkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masih kurang optimal. Berkaitan dengan hal diatas dapat dilihat bahwa faktor psikologis memiliki pengaruh yang menyebabkan kinerja BPD kurang optimal.

3. Kinerja BPD di Desa Wajok Hilir dikaji dari faktor organisasi.

   Faktor organisasi secara umum dikatakan belum baik berkaitan dengan aspek sumber daya yang dimiliki oleh BPD masih kurang ditambah lagi dengan sumber daya materi yang dimili BPD belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penunjang jalannya tugas pokok dan fungsi BPD, kepemimpinan yang ada pada BPD masih kurang baik didasari dari pengambilan keputusan ketua BPD masih belum tegas oleh ketua BPD, dan rencana kerja yang dimiliki anggota BPD sebatas opini masing-masing anggota BPD belum berdasarkan urayan-urayan yang jelas dalam suatu agenda karena sistem administrasi BPD yang belum berjalan.

Berdasarkan hasil analisis dari tiga faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor individu, faktor psikologis dan faktor organisasi dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi kineja BPD iyalah faktor individu karena faktor tersebut yang paling mendasar dalam menjalankan kegitan suatu organisasi, berhasil atau tidak, berjalan atau tidaknya kinerja tergantung dari faktor individunya.

D. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kinerja BPD, peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat diperhatikan, untuk meningkatkan kinerja BPD khususnya BPD di Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah adapun saran yang peneliti berikan ialah:

1. Secara individu terkaita akan kemampuan dari kinerja BPD dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan yang tertera sebagai berikut:

No.	StrukturOrganisasi BPD	Tingkat Pendidikan
1.	Ketua BPD	Sarjana S1
2.	WakilKetua BPD	SMA
3.	Sekretaris BPD	SMA
4.	Anggota	SMA
5.	Anggota	SMA
6.	Anggota	SMA
7.	Anggota	SMA

Tingkat pendidikan yang dimiliki anggota BPD saat ini dapat dikatakan baik tetapi dari faktor pendidikan yang hannya tamatan SMA belum menjamin dapat memahami dalam pembuatan peraturan maupun tugas pokok dan fungus BPD yang lainnya jika tidak di bekali oleh kegiatan pembelajaran terutama dari tugas pokok dan fungsi BPD. Secara individu perlu diadakan bimbingan atau pelatihan khusus mengenai tugas pokok dan fungsi BPD berkenaan dengan kemampuan dalam mekanisme penyusunan Peraturan Desa dari pemerintah daerah Kabupaten Mempawah dan memberikan bimbingan berkaitan dengan tugas BPD sebagai lembaga aspirasi masyarakat agar mampu mewadahi keinginan maupun aspirasi masyarakat untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa.

2. Dalam hal psikologis yang dimiliki anggota BPD, diharapkan anggota BPD mampu memberikan pandangan yang baik untuk masyarakat agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BPD dapat dilakukan secara optimal dan BPD seharusnya memiliki sikap yang tegas dalam hal apapun dan memberikan contoh kepada bawahannya, meningkatkan motivasi dari anggota BPD dengan menumbuhkan kesadaran akan lingkungan kerja.
3. Dalam faktor organisasi BPD perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi sumber daya yang dimiliki BPD, meningkatkan lagi jiwa kepemimpinan yang ada di ketua maupun setiap anggota BPD berkaitan dengan membahas sebuah peraturan serta menertipkan para anggota. Rencana kerja yang seharusnya dimiliki oleh anggota BPD agar jalannya pekerjaan sesuai dan mencatat semua apa kegiatan BPD dalam satu buku untuk memudahkan rencana kerja BPD sehingga berjalan dengan baik serta menghasilkan kinerja yang optimal.

Serta perlunya mengajugan pertimbangan anggaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPD kepada Pemerintah Daerah.

E. KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kendala selama melakukan penelitian. Adapun keterbatasan dan kendala yang dirasakan oleh peneliti iyalah:

1. Waktu yang diberikan oleh lembaga hanya dua minggu hal ini dirasakan peneliti terlalu singkat untuk melakukan penelitian.
2. Kurangnya respon yang diberikan dari informan kepada peneliti mengenai kinerja BPD sehingga membuat peneliti harus lebih giat dan banyak mencari informasi yang tahu akan tugas pokok dan fungsi BPD.
3. Sebagian masyarakat yang ditemui menolak untuk diwawancara.
4. Anggota BPD yang sulit ditemui dikarenakan memiliki pekerjaan utama selain menjadi anggota kepengurusan BPD dan jarang ada di tempat.
5. Kurangnya keterampilan penulis dalam merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat menyebkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran kedalam bentuk tulisan.

F. REFERENSI

A. Referensi Buku

Amins, Achmad. 2012. ***Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah***.Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Dwiyanto, dkk. 2008. ***Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia***. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Ibrahim, M. J. 1991. ***Prospektif Otonomi Daerah***.Semarang: Dahara Prize.

Mangkunegara, A.A Anwar Prabu. 2005. ***Evaluasi Kinerja SDM***. Bandung: Retika Adima.

Mahmudi. 2005. ***Manajemen Kinerja Sektoral Publik***. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.

Mahsun, Mohamad. 2006. ***Pengukuran Kinerja Sektor Publik.*** Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.

Moheriono. 2012. ***Perencanaan, Aplikasidan Pengembangan Indiktor***

***Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*.** Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy. J. 2013. ***Metode Penelitian Kuanlitatif*.** Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pasolog, Harbin. 2007. ***Teori Administrasi Publik***. Jakarta: Grafindo

Prawirosentono, Suryadi. 1999. ***Kebijakan Kinerja Karyawan***. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Roziqin, Muhammad Zainur. 2010. ***Kepuasan Kerja***. Malang : Averroes Press.

Sembiring, Masana. 2012. ***Budayadan Kinerja Organisasi*.** Bandung: Fokus Media.

Sudarmanto. 2009. ***Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surjadi, H. 2009. ***Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik***. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2009. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D***. Bandung: Aifabeta.

Uno, Hamzah B. 2012. ***TeoriKinerjadanPengukurannya***. Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, S. 1999. ***Otonomi Daerah,*** Jurnal Ganesha. Vol. 1, No. 1 Desember.

Widjaja, H.A.W. 2010.***Otonomi Desa*.** Jakarta: Rajawali Pers.

Wibowo.M.Phil. 2007.***Manajemen Kinerja***, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Hadiansyah, Nurul. 2013. ***Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Masyarakat di Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas***: Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Nuzulita, Suci. 2014. ***Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.*** Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan dikeluarkan oleh Prodi IP FISIP UNTAN. 2015.

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang – Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LLMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage :http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika universitas tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	: Desi Amalia
NIM / Periode Lulus	: E42012004 / 2016
Fakultas / Jurusan	: ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP	: adesi416@gmail.com / 082159948496

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA DI DESA WAJOK HILIR KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikanya di internet atau media lain :

☐ fulltext
☑ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP

Dr. H. Wijaya Kusuma, M.A
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 Januari 2017

(Desi Amalia)